

TRANSFORMASI POLITIK DALAM MASYARAKAT ISLAM MAYORITAS: DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERAN AGAMA DAN IDENTITAS KEAGAMAAN

Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: iqbalattaqi22@gmail.com

Muhammad Athaillah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: muhammadathoillah1313@gmail.com

Ahmad Dhafid Penghabean

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Masdaped359@gmail.com

Abstrak

Demokrasi telah menjadi kebutuhan zaman dan merupakan komponen penting dalam kehidupan modern. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki hak-hak demokrasi, yang mencakup hak untuk berpikir, berekspresi dan berorganisasi. Agama Islam sebagai basis suara terbanyak di Indonesia memberikan ruh politik yang identistik dalam berdemokrasi. Dimulai dari pasca reformasi, munculnya partai-partai islam mentransformasi perubahan politik dalam mayarakat. Fenomena ini lantas dikenal dengan politik identitas yang memasukkan tiap unsur keberagamaan. Padahal dalam agama sendiri masih terdapat perdebatan mengenai Agama dan Negara. Dalam penelitian ini, mengupayakan bagaimana agama ditransformasikan untuk memberi peran yang berdampak positif baik itu partisipasi politik muslim dan hubungan antara agama dan negara.

Kata Kunci: *Transformasi Politik, Demokrasi, Agama.*

Pendahuluan

Agama adalah sistem kepercayaan dan doktrin yang terdiri dari nilai-nilai, peraturan, dan standar yang membantu orang bertindak dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama mereka dalam kehidupan masyarakat yang dinamis.¹ Pada dasarnya, agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan masalah kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

Indonesia, dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, adalah negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas terbesar di dunia. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, negara ini telah menjalani perjalanan panjang dalam mengembangkan sistem politik demokratis yang mengakomodasi masyarakat Islam mayoritas yang

¹Kholish, Moh. Anas dan Yulianto. Dialektika Pemikiran Islam dan Demokrasi *Manhaj Indonesia: Sebuah Potret Historisitas, Kontinuitas dan Perubahan*. *Jurnal Waskito*. Vol. 2. No. 2. 2018, 7.

beragam. Transformasi politik yang terjadi seiring waktu telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia.

Transformasi politik dalam masyarakat Islam mayoritas di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk peran agama dalam politik, identitas keagamaan, partisipasi politik Muslim, dan hubungan antara agama dan negara. Keberadaan demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh Indonesia telah memberikan landasan penting dalam membentuk dan mengubah dinamika tersebut.

Identitas begitu marak dalam politik Indonesia. Dalam pertarungan politik, identitas Islam akhir-akhir ini sering digunakan, tidak mengherankan karena mayoritas pemilih di Indonesia beragama Islam.²

Dalam konteks demokrasi, peran agama dan identitas keagamaan masyarakat Islam mayoritas menjadi penting untuk dipahami. Dalam sistem politik demokratis, agama dapat berperan sebagai sumber nilai, panduan etis, dan motivasi dalam partisipasi politik.³ Namun, demokrasi juga dapat mempengaruhi dan mengubah interpretasi dan praktik keagamaan, serta membawa perubahan dalam identitas keagamaan individu dan kelompok.⁴

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis transformasi politik dalam masyarakat Islam mayoritas di Indonesia dan mengkaji dampak demokrasi terhadap peran agama dan identitas keagamaan. Dengan melihat perkembangan politik terkini dan dinamika sosial di Indonesia, artikel ini mencoba mendiskusikan perihal peran agama dalam politik, perkembangan identitas keagamaan, dan tantangan yang dihadapi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah kompleksitas politik dan agama.

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini mencakup analisis literatur, studi kasus, dan penelitian lapangan. Dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, artikel ini akan menyajikan analisis yang komprehensif tentang transformasi

²Anam, Haikal Fadhil. Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politea Pemikiran Politik Islam*. Vol. 2. No. 2. 2019, 181.

³Rahman, Ratnah. Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Jurnal Sosioreligius*. Vol. 1. No. 4. Juni 2019, 80-81.

⁴Rubaidi dan Dwi Setianingsih. Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019. *Jurnal Potret Pemikiran*. Vol. 25. No. 2. 2021, 151.

politik dalam masyarakat Islam mayoritas di Indonesia dan konsekuensinya terhadap peran agama dan identitas keagamaan.

Diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman tentang transformasi politik dalam masyarakat Islam mayoritas di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana demokrasi mempengaruhi peran agama dan identitas keagamaan. Selain itu, artikel ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam memperkuat inklusi dan harmoni sosial dalam konteks politik yang demokratis di Indonesia.

Konstruksi Demokrasi

Di pertengahan hayat, persoalan negara dan agama kerap diperbincangkan secara terbuka, sejalan dengan tuntutan aspirasi politik Islam yang semakin berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seolah-olah negara Islam dipandang sebagai solusi ideal bagi kehidupan politik modern. Karena konsep Negara Islam tidak jelas atau ketinggalan jaman dalam diskusi politik Islam, diperlukan teori dan reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis tentang masalah ini. Untuk mendapatkan kejelasan teologis tentang Daulah Islam, kemungkinan-kemungkinan ini harus dikaji ulang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Ketika Syariah diperkenalkan sebagai hukum nasional, muncul pertanyaan tentang hubungannya dengan urusan kontemporer, sebagai elemen hukum internasional, hak-hak non-Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Sangat penting untuk mengambil pendekatan baru terhadap Syariah dalam ijtihad karena banyak isu terkini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin atau al-syari'ah al-Islam sha'ihi li kulli zamān wa makān. Apalagi prinsip-prinsip universalisme Islam selalu berkembang mengikuti zaman.⁵

Orientalis Joseph Schacht mengatakan bahwa Islam adalah sistem penting yang mencakup agama dan negara. Menurut Qardhawy, Islam yang sejati terdiri dari iman, ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moralitas dan material, budaya dan hukum. Meskipun Islam merupakan ajaran universal yang didasarkan pada berbagai struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum, namun dalam penerapannya nilai-nilai universal tersebut bertentangan dengan budaya suatu negara

⁵Rumadi. Islam dan Otoritas Keagamaan. *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1. Mei 2012, 31.

tertentu. Misalnya, meskipun Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim, praktik pemerintahannya berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya di seluruh dunia.⁶

Dalam kehidupan nyata, demokrasi yang memberikan tanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan negara seringkali berubah ketika pemerintah negara mengambil langkah-langkah untuk membatasi kehendak dan kekuasaan rakyat dalam menjalankan negara. Langkah-langkah ini diambil dengan amandemen konstitusi atau undang-undang oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Langkah-langkah hukum formal dan konstitusional digunakan untuk mengubah dan membatasi demokrasi.

Tidak semua pihak berhasil mencapai tujuan demokrasi. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi empat masalah umum. Pertama, misi pelayanan publik. Peran utama pemerintah adalah melayani masyarakat, terutama dalam pelayanan yang memerlukan perencanaan, koordinasi, jaringan atau infrastruktur. Kejahatan, kelangkaan sumber daya, terutama masalah air dan sanitasi, pengangguran, fasilitas kesehatan yang buruk, kemacetan lalu lintas, dan lainnya adalah beberapa masalah yang dihadapi pemerintah lokal. Kedua, pembangunan kota. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan lingkungan menjadi buruk dan pemerintah kota menjadi kurang efektif untuk menangani masalah ini. Salah satu masalah terbesar abad ke-20 ini adalah urbanisasi. Masalah baru akan muncul di perkotaan jika pemerintah lokal tidak mengatasinya hal ini.

Dalam bukunya Al-Quran, Demokrasi Politik & Ekonomi, Muni Umar mengatakan bahwa, meskipun telah terjadi perubahan besar setelah tumbangnya orde baru, kemajuan saat ini dalam penerapan demokrasi masih belum memuaskan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa selama periode reformasi demokrasi, individu memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk bertindak sesuka mereka, yang menyebabkan ketidaketeraturan (disorder) di masyarakat.⁷

Abdurrahman Wahid yang bernama lengkap Abdurrahman Ad-dhakil atau biasa disapa Gus Dur merupakan salah satu tokoh penting dalam proses demokrasi Indonesia. Karena pandangannya tentang demokrasi, Abdurrahman Wahid dianggap sebagai aktivis prodemokrasi. Sebagaimana dikutip Abdillah, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa

⁶Putera, Rachmat Panca. Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Dari Formalistik Menuju ke Substantif. *Jurnal Ri'ayah*. Vol. 3. No. 1. Januari-Juni 2018, 58.

⁷Rozi, Syafwan. Kontruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan. *Ringkasan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati*. Vol. 39. No. 1. 2013, 216.

demokrasi yang dilakukan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dilakukan di negara-negara Barat. Sebaliknya, demokrasi ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip budaya yang berkembang di Indonesia.⁸ Abdurrahman Wahid memasukkan gagasan demokrasi ke dalam budaya Indonesia, yang dianggapnya sebagai rahmat li al-âlamin (rahmat bagi seluruh umat manusia) sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

Keadaban politik penting dalam demokrasi. Pembebasan, esensi demokrasi, berarti masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dengan aturan yang jelas sehingga yang kuat tidak menindas yang lemah. Ini bisa terjadi ketika undang-undang mengatur semua jenis permainan - budaya, ekonomi, dan politik. Aturan main harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk kehidupannya. Setiap pelaku sosial dari segala tingkatan dan kemampuan harus menghormati aturan main yang ditetapkan dan diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, apakah pemerintah, pengusaha, atau rakyat biasa harus mematuhi dan menghormati hukum? Peradilan dapat mengambil tindakan tanpa pandang bulu terhadap setiap pengusaha yang melanggar atau mengubah aturan.

Di tengah era reformasi ini, banyak ironi atau paradoks demokrasi yang muncul, menunjukkan betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh bangsa ini untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mudah menciptakan demokrasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, baik secara spiritual maupun politik. Akhirnya, perjuangan demokrasi harus berhadapan dengan godaan kekuasaan yang pada dasarnya anti demokrasi.

Demokrasi telah menjadi kebutuhan zaman dan merupakan komponen penting dalam kehidupan modern. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki hak-hak demokrasi, yang mencakup hak untuk berpikir, berekspresi, berkumpul, berorganisasi, memilih, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berada di tangan rakyat. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan mereka.

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penganut agama Islam terbesar yang memiliki sistem politik demokratis. Dalam iklim demokrasi ini, mulai

⁸Dahlan, Moh. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Jurnal Analisis: Studi Keislaman*. Vol. 14. No. 1. Juni 2014, 4-5.

muncul juga berbagai partai politik Islamis dan kelompok Islamis dengan agenda Islamisme mereka di Indonesia muncul. Pasca reformasi, kelompok Islam konservatif telah berkembang dalam berbagai ruang politik, bahkan beberapa organisasi yang memiliki ideologi Islam yang cenderung garis keras semakin banyak bermunculan.

Sebagai bagian dari gerakan politik hukum demokratis, Undang-Undang dibuat untuk memperbaiki penyelenggaraan dan peraturan pemerintahan. Oleh karena itu, semangat demokrasi harus dibangun melalui pembentukan sistem hukum dan tata hukum yang berkeadilan yang mengutamakan kepentingan warga daripada kepentingan pihak lain.⁹

Oleh karena itu, semangat demokrasi harus dibangun melalui pembentukan sistem hukum dan tata hukum yang berkeadilan yang mengutamakan kepentingan warga daripada kepentingan pihak lain. Namun, saat ini telah terjadi perubahan lagi dengan munculnya Undang-Undang dan bahkan Perpu yang mengatur pemilihan kepala daerah.

Peran dan Identitas Keagamaan

Menurut Ibnu Khaldun, agama adalah dua sisi yang sulit dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, yaitu agama, akan menentukan kohesi sosial, solidaritas, dan ikatan sosial yang kuat. Dengan kata lain, dua faktor utama yang menentukan solidaritas sosial, yaitu faktor kekerabatan atau keturunan, dan faktor agama. Agama dianggap paling penting dalam penelitian Ibnu Khaldun karena kemampuannya untuk memperkuat solidaritas masyarakat dan meminimalkan konflik.¹⁰

Meskipun agama masyarakat berbeda-beda, setiap masyarakat selalu menginginkan kehidupan yang aman, damai, teratur, dan seimbang yang sesuai dengan multikulturalisme. Kehidupan yang damai dapat dicapai jika masyarakat mampu menghargai perbedaan agama dan saling menghargai. Kehidupan sosial dan agama harus bersatu untuk mempertahankan integrasi.

Islam adalah agama yang universal karena tujuan agama adalah rahmatan lil alamin. Selain itu, agama ini memberi manusia ide-ide tentang hal-hal yang berkaitan

⁹Ibid., Dahlan, Moh. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia..., 4-5.

¹⁰Kasdi, Abdurrahman. Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam. Jurnal Addin. Vol. 9. No. 2. Agustus 2015, 279.

dengan sistem, seperti politik, ekonomi, dan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam bidang politik, Islam menggunakan untuk mengurus urusan umat. Beberapa pemikir dan politisi muslim telah membangun Islam dan politik integratif, masing-masing dengan cara dan pendekatan mereka sendiri.

Politik Islam adalah pertarungan Islam dengan kekuasaan dan negara yang menghasilkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sifat-sifat Islam juga digunakan dalam budaya politik. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pengaruh islam dalam perpolitikan Indonesia menjadi krusial, masyarakat islam mayoritas digunakan sebagai basis mendulang suara terbanyak, sehingga muncul lah politik identitas agama.¹¹

Di Amerika Serikat, politik identitas pertama kali muncul pada tahun 1970-an sebagai tanggapan atas perjuangan orang-orang yang termasuk kelompok minoritas, gender, atau ras yang merasa dikucilkan. Sepanjang sejarah manusia, perjuangan untuk pengakuan telah menggerakkan mereka. Pengakuan universal, ketika nilai setiap orang diakui, adalah satu-satunya solusi logis untuk keinginan ini. Pengakuan universal ini menantang pengakuan parsial berdasarkan bangsa, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin atau individu yang ingin diakui sebagai superior.¹²

Dalam politik, identitas sering disebut menyimpang dari prinsip persatuan dan kesatuan; Ia digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan suara dalam pemilu, menggalang dukungan massa, dan mencapai tujuan politik pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.¹³ Karena politik identitas pada hakekatnya adalah fenomena politik yang mengedepankan perbedaan identitas. Politik identitas saat ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang dapat merugikan bangsa. Politik identitas menentang demokrasi yang partisipatif, setara, dan berorientasi pada hak-hak sipil. Demikian pula di Indonesia, di mana demokrasi mendorong bangkitnya politik identitas melalui konflik, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.¹⁴

¹¹Baihaqi, Wazin. Pengaruh Islam terhadap Kekuasaan Politik di Indonesia. *Jurnal al-Qalam*. Vol. 22. No. 1. Januari-April 2005, 2.

¹²Fadhl, Yogi Zul. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukunya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 2. Juni 2014, 352-353.

¹³Wahid. Ramli Abdul. Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia. *Jurnal Contemporary Islam and Muslim Societies*. Vol. 1. No. Juli-Desember 2017, 142-143.

¹⁴Mubasirun. Persoalan Dilematis Muslim Minoritas dan Solusinya. *Jurnal Episteme*. Vol. 10. No. 1. Juni 2015, 100.

Di antara fenomena politik identitas yang muncul pada masa demokrasi adalah penggunaan politik identitas dalam kaitannya dengan kepentingan agama sebagai alat kelompok kepentingan untuk mengekspresikan keinginannya.¹⁵ Selain itu, karena pemahaman hukum dan politik yang kurang komprehensif di kalangan masyarakat Indonesia, dikhawatirkan emosi yang tersulut akan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang merusak keutuhan bangsa Indonesia. Sebaliknya, kelompok separatis juga menggunakan politik identitas rasial untuk mencoba melepaskan diri dari NKRI.

Pasca mobilisasi massa pada Pemilu 2016 di Jakarta, politik identitas Muslim meledak dalam gelombang besar. Hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan bernegara, termasuk demokrasi Indonesia saat ini. Namun, demokrasi Indonesia masih terus berkembang. Meskipun politik identitas diperbolehkan dalam demokrasi, namun terlalu banyak yang buruk, terutama di Indonesia, yang masyarakatnya beragam secara ras, etnis, dan agama. Dalam hal ini, politik identitas Islam merupakan politik identitas yang sedang berkembang. Meskipun kelompok atau golongan sosial tertentu mengklaim bahwa hak mereka tidak sama, politik identitas muncul dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia. Selain itu, politik identitas Indonesia semakin mempertegas perbedaan karena perbedaan merupakan ukuran utama keberagaman negara. Ketidakstabilan negara akan terjadi karena konflik yang disebabkan oleh politik identitas yang beragam.¹⁶

Semenjak zaman penjajahan hingga kemerdekaan, struktur politik identitas Indonesia telah muncul dan menjadi kuat. Karena persamaan identitas sebagai warga negara yang merdeka, orang menjadi sangat nasionalis dan menunjukkan politik identitas mereka dalam praktik ketatanegaraan.¹⁷

Pada masa itu, nasionalisme tidak hanya menjadi dasar politik identitas Indonesia. Perjuangan masyarakat Indonesia, yang didominasi oleh umat muslim, sangat berpengaruh pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme telah hidup bersama selama

¹⁵Harahap, Fitri Ramadhani. 2014. *Politik Identitas Berbasis Agama*. Yogyakarta: APPSI UGM, 518.

¹⁶Maharani, Putri. Peran Identitas Agama terhadap Status Identitas Diri. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 33.

¹⁷Wingarta, I Putu Sastra dkk. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9. No. 4, 118.

bertahun-tahun dan bekerja sama dengan baik. Ini bukan hanya skenario bahwa orang muslim ingin menjadikan identitas keagamaan yang mereka anggap lebih penting dalam struktur negara.¹⁸ Konflik politik seringkali disebabkan oleh politik identitas, terutama dalam hal konflik antara mayoritas dan minoritas atau antara kelompok yang lebih tinggi dan lebih rendah.¹⁹

Memasuki era reformasi, hubungan antara Islam dan politik menjadi tema aneh yang mengiringi demokratisasi. Salah satu fenomena pasca-Orde Baru adalah kehadiran partai-partai Islam dan gerakan Islam garis keras.²⁰ Menurut para pendukungnya, demokratisasi terdiri dari partisipasi Islam dalam politik, baik dalam partai atau gerakan sosial. Dengan menggunakan argumen mayoritas, kelompok keras dari mereka berpendapat bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan peraturan daerah. Sebaliknya, mereka yang mempertahankan keyakinan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi negara Pancasila, yang mengutamakan semua golongan, termasuk agama, menentang argumen kelompok keras di atas. Kelompok terakhir berpendapat bahwa Islam, seperti agama lain, memiliki hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia, tetapi ia harus ditempatkan di ruang privat daripada ruang publik. Mereka juga berpendapat bahwa agama harus di-“sipilkan” terlebih dahulu dengan menghilangkan aspek eksotisnya.

Sulit untuk memperkirakan dampak yang dimiliki masing-masing kelompok di atas terhadap pandangan sosial. Namun, menurut Mudzakkiri, kekalahan partai Islam pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 bahkan 2014 menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendukung gagasan keterkaitan antara Islam, politik, dan negara. Namun, di beberapa daerah di mana Islam telah lama dominan, beberapa partai Muslim memperoleh suara yang signifikan. Partai-partai Islam masih bisa menggalang dukungan dengan membuat janji-janji teologis kepada pendukungnya. Hal ini dilatarbelakangi ketidakmampuan partai non-agama untuk memenuhi janji kampanye mereka dan kurangnya semangat dan nuansa ideologis yang diderita hampir semua partai politik Indonesia saat ini.

¹⁸Lestari, Yeni Sri. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Jurnal Politics and Policy*. Vol. 1. No. 1. Desember 2018, 19-20.

¹⁹Amalia, Novi Rizka. Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Dauliyah*. Vol. 2. No. 1. Januari 2017, 33.

²⁰Subikto, Adi Budiman dan Nur Kafid. Strategi Defensif dan Ofensif Parpol Berbasis Massa Islam dalam Mencapai *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2014. *Jurnal Shahih*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016, 38.

Transformasi Politik dalam Masyarakat Islam Mayoritas di Indonesia

Beberapa sarjana masyarakat Islam menolak demokrasi, yang lain menerimanya dengan syarat, dan yang lain lagi menerimanya sepenuhnya. Orang-orang yang menentang demokrasi mengatakan bahwa ini bukan sistem Islam. Salah satunya adalah Maududi yang menjelaskan bahwa konsep demokrasi Islam berlawanan dengan demokrasi sekuler Barat dan menyebabkan perubahan dari kedaulatan Tuhan menjadi kedaulatan rakyat. Berbeda dengan Syekh Al-Azhar Ahmad Tayyib yang mendukung demokrasi karena melindungi martabat setiap orang. Dengan cara yang sama ada yang menolak dan ada yang menerima. Abdurrahman Wahid adalah salah satu yang paling bisa menerima. Jalaludin Rahmat memahami demokrasi sebagai gagasan sistem politik yang mendukung hak asasi manusia seperti hak asasi manusia atas persamaan dan kebebasan berekspresi. Namun, dia tetap percaya bahwa Islam ada di tangan Tuhan dan demokrasi adalah sistem sekuler. Nurcholis Majid mengatakan bahwa hakikat demokrasi tidak perlu didefinisikan karena merupakan proses yang selalu berubah menjadi lebih baik.²¹

Indonesia memiliki sejarah panjang hubungan antara Islam dan politik. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika banyak Muslim pertama kali datang ke Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Islam telah melakukan perbincangan lokal dengan realitas sosial dan politik. Padahal, Islam telah memainkan peran penting sepanjang sejarah politik Indonesia. Namun, Islam tidak segera diakui sebagai agama politik. Reformasi di Indonesia beberapa dekade yang lalu (1998) seharusnya membawa perubahan penting dan mendasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan rakyat, kemajuan ekonomi, pendidikan, supremasi hukum dan kehidupan sosial dan politik tidak berubah sejak lama. Jika Anda tidak ingin mengatakannya menjadi lebih buruk, stagnasi akan berubah. Ini karena reformasi tidak membawa perubahan besar. Singkat kata, baik sebelum maupun sesudah reformasi, tatanan kehidupan sekuler, praktik korupsi yang merajalela dan merajalela, degradasi lingkungan yang tak terelakkan, pornografi dan tindakan yang tak terkendali, serta peningkatan kemiskinan menciptakan citra buruk bagi Indonesia. Selain itu, negara asing dan kekuatan asing menguasai sumber daya alam yang seharusnya digunakan

²¹ZA, Tabrani. Diskursus Simbiotik Agama dan Politik dalam Epistemologis Pemikiran Islam. *Jurnal al-Ijtima'*. Vol. 7. No. 1. Oktober 2021, 80.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, mereka memberikan pengaruh besar pada politik nasional. Oleh karena itu, perubahan politik Islam dalam sistem demokrasi bergantung pada proses perubahan masyarakat, yaitu. H. dari perencanaan sosial ke Islam. Proses ini mencakup pemahaman tentang realitas masyarakat dari perspektif Islam, pemahaman tentang teknik-teknik transformatif yang digunakan dalam Islam, dan pemahaman tentang masyarakat ideal yang harus muncul.²²

Pada masa kemerdekaan dan pasca reformasi, penyebaran Islam politik dipandang sebagai persaingan kekuatan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kebangsaan negara. Persepsi ini mencerminkan upaya negara untuk menghentikan dan menjinakkan gerakan ideologi politik Islam.

Idealisme dan aktivisme politik Islam yang legalistik dan formalistik menjadi penyebab utama konflik politik antara Islam dan negara. Hubungan yang tidak harmonis ini terjadi akibat perbedaan pendapat di antara para pendiri republik yang sebagian besar beragama Islam, tentang kemana negara Indonesia harus dipimpin, apakah nasionalis atau Islamis.²³

Isu-isu politik Islam dikembangkan dari segi ideologi dan simbol ketimbang konten; Perdebatan mencapai puncaknya pada paruh kedua tahun 1950-an. Catatan sejarah yang luar biasa hidup ini dengan jelas menunjukkan bahwa cita-cita ideologis antara kaum nasionalis sekuler dan Muslim tidak dapat didinginkan oleh suhu politik Majelis Konstituante yang terbatas.²⁴

Upaya menemukan hubungan politik yang tepat antara Islam dan negara terus berlanjut pada masa pasca kemerdekaan dan pasca revolusi. Namun, upaya ini tidak berhasil, menyebabkan lebih banyak ketidakpercayaan antara Islam dan negara.

Meski cita-cita membangun hubungan baik dan saling menguntungkan antara Islam dan negara belum sepenuhnya terwujud, namun ada beberapa tanda penting bahwa Islam politik telah kembali hadir dalam kehidupan politik negara ini. Bukti dari perkembangan baru ini adalah sikap bersahabat negara terhadap Islam, yang tercermin

²²Lukman, Fahmy. Transformasi Politik Islam di Indonesia dalam Sistem Demokrasi. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 1. No. 1. 2018, 4.

²³Zaprulkhan. Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Review Politik*. Vol. 3. No. 2. Desember 2013, 155.

²⁴Mahanani, Qisthi DI dkk. Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal al-Isnad*. Vol. 3. No. 1. Juni 2022, 63.

dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap relevan dengan kepentingan sosial, ekonomi dan politik Islam.²⁵

Indonesia bukan negara Islam atau sekuler; sebaliknya, itu adalah negara religious yang memungkinkan dan membantu penduduknya melakukan tanggung jawab agama mereka.

Pernyataan di atas sangat konsisten dengan apa yang terjadi di negeri ini ketika pemerintah mengikuti kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama Islam dan membantu warganya menunaikan kewajiban agamanya. Berdasarkan perkembangan realitas tersebut, terjadi perubahan politik antara Islam dan negara pada tahun 1980-an dan 1990-an. Begitu negara-negara "berteman" dengan Islam, mereka siap menawarkan perlindungan.

Istilah "substansialis" digunakan untuk menggambarkan proses perubahan wajah politik Islam di Indonesia dari substansi legalistik menjadi formalistik. Istilah ini merujuk pada proses transmisi ideologi politik Islam di Indonesia dari keinginan memperjuangkan formalisme Islam dalam struktur negara atau menjadikan Islam sebagai dasar negara, menjadi interpretasi esensialis terhadap nilai-nilai Islam yang terkait dengan negara.

Dalam situasi ini, Islam tidak lagi dilihat melalui struktur simboliknya, melainkan melalui nilai-nilai yang dibawanya, seperti prinsip-prinsip rahmatan li al-alamin, seperti keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musawah) dan refleksi (Syura) yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Masyarakat adil dan makmur bukanlah tujuan yang diperjuangkan, melainkan cita-cita mendirikan negara Islam atau mempertahankan ideologi Islam. Dalam situasi ini, Islam dianggap kompatibel dengan perkembangan negara kesatuan nasional Indonesia. Selama negara memiliki sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, maka tidak perlu ada hubungan legalistik antara Islam dan negara.

Beberapa faktor penting lainnya juga ikut menentukan keputusan untuk membangun persatuan nasional Indonesia. Ini termasuk fakta bahwa (1) negara memberikan kebebasan umat Islam untuk menjalankan agama mereka; (2) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam; dan (3) konstitusi negara tidak bertentangan

²⁵Ridwan. Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan al-Banna. *Jurnal Hukum Sambudra Keadilan*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember 2017, 224.

dengan agama Islam bahkan terkadang mencerminkan prinsip-prinsipnya. Indonesia harus dibanggakan karena meskipun banyak negara lain memiliki demokrasi yang sama, mereka tidak bisa menerapkannya dengan baik, yang berarti gagal. Meningkatnya angka pengangguran, kemacetan jalan raya, dan peningkatan masalah korupsi dan penyelewengan adalah beberapa contoh efek demokrasi dalam sistem demokrasi sebuah negara.²⁶

Bagi Indonesia, demokrasi adalah Pancasila, yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem pemerintahan dan pandangan hidup. Sistem pemerintahannya mengedepankan transparansi, toleransi, perdamaian dan ketertiban, dan cara hidupnya menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kebebasan dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan negara. Demokrasi adalah inti dari budaya. Oleh karena itu, monisme (individualistik), sekuler, dan antroposentris merupakan dasar dari kesadaran identitas budaya barat, yang menghasilkan sistem demokrasi liberal. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia yang dilandasi kesadaran akan identitas majemuk tunggal.²⁷ (individu sosial, jasmani-rokhani, makhluk pribadi-makhluk Tuhan), agama, dan teologi. Oleh karena itu, Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dilandasi oleh kesadaran akan jati diri bangsa Indonesia. itu adalah demokrasi yang tidak hanya logis tetapi juga religius; itu menghargai kepentingan sosial, bukan hanya kepentingan individu; itu adalah kuantitatif (majoritas) dan kualitatif (kebijaksanaan).

Kegiatan yang saling bertentangan dalam proses perubahan politik Islam dalam masyarakat Islam Indonesia melalui pintu demokrasi pasti akan menimbulkan konflik dan pertentangan. Oleh karena itu, perubahan politik yang diharapkan dalam tipologi masyarakat Islam Indonesia adalah proses mendidik umat Islam kepada Islam sebagai mabda'u lil hayah (konsep dasar kehidupan), sebagaimana kaum sekuler memahami kapitalisme sebagai ideologi kehidupan demokrasi. mereka Oleh karena itu, kebangkitan masyarakat banyak bergantung pada kemajuan pemikiran dan tingkat masyarakat tentang manusia, alam semesta dan kehidupan, serta hubungan antara

²⁶Syahdiyono, Fadli. Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mansyur Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2. Maret 2022, 1-2.

²⁷ZA, Tabrani dan Warul Walidin. Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep *Dien wa Ni'mah* dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal al-Ijtima'*. Vol. 3. No. 1 Oktober 2017, 15.

ketiganya. Melakukan perubahan dari sudut pandang kehidupan, baik dari sudut pandang maupun dari sudut pandang, merupakan proses perubahan yang nyata.

Kesimpulan

Transformasi politik dalam masyarakat Islam mayoritas di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti hubungan antara agama dan negara, peran agama dalam politik, identitas keagamaan, dan partisipasi politik Muslim. Dinamika ini banyak dipengaruhi oleh sistem politik demokrasi Indonesia.

Identitas dalam politik di Indonesia. Terutama identitas islam adalah identitas yang sering digunakan dalam pertarungan politik. Memang tidak mengherankan bahwa identitas Islam digunakan secara luas, mengingat mayoritas pemilih di Indonesia beragama Islam.

Demokrasi politik di Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar. Banyak partai politik Islamis juga mulai muncul di tengah demokrasi ini. Demokrasi juga memungkinkan munculnya partai politik yang berbasis agama.²⁸ seperti halnya demokrasi, yang merupakan kebutuhan zaman dan merupakan komponen utama kehidupan manusia saat ini. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki hak-hak demokrasi, yang mencakup hak untuk berpikir, berekspresi, berkumpul, berorganisasi, memilih, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Dalam penyelenggaraan negara, rakyat adalah pemegang kekuasaan, pembuat, dan penentu kebijakan dan keputusan tertinggi.²⁹

Namun, kebebasan demokrasi ini menentukan bagaimana politik Indonesia berjalan. Politik praktis seperti identitas muncul sebagai alat politik,³⁰ baik untuk mendapatkan suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa, maupun untuk tujuan politik untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Karena politik identitas pada dasarnya adalah fenomena politik yang menekankan perbedaan identitas. Politik Identitas adalah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Akibatnya,

²⁸Harahap, Rizki Pristiandi. Islam Politik di Indonesia: Analisis Historis terhadap Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960). Tesis tidak diterbitkan. Jurusan Pemikiran Islam Program Studi Sosial Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan, 38.

²⁹Irwan, Syafitri. Islam dan Politik Identitas: Studi tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam. *Jurnal Medina-T*. Vol. 15. No. 2. Desember 2019, 173.

³⁰Roring, Franky P. Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas. *Jurnal Communitarian*. Vol. 3. No. 2. Februari 2022, 526.

perjuangan demokrasi di Indonesia untuk identitas yang menonjol ini harus mengalami transformasi politik, terutama dalam komunitas muslim yang menjadi mayoritas di negara itu. Karena banyak aktivitas yang saling bertentangan, melewati pintu demokrasi pasti akan menghasilkan konflik dan kontradiksi. Oleh karena itu, dalam berbagai keaneragaman masyarakat muslim Indonesia, proses transformasi politik yang diharapkan adalah mencerdaskan umat muslim sebagai langkah muslim yang berkehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Novi Rizka. Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Dauliyah*. Vol. 2. No. 1. Januari 2017.
- Anam, Haikal Fadhil. Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politea Pemikiran Politik Islam*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Baihaqi, Wazin. Pengaruh Islam terhadap Kekuasaan Politik di Indonesia. *Jurnal al-Qalam*. Vol. 22. No. 1. Januari-April 2005.
- Dahlan, Moh. Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Jurnal Analisis: Studi Keislaman*. Vol. 14. No. 1. Juni 2014.
- Fadhli, Yogi Zul. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukunya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 2. Juni 2014.
- Harahap, Fitri Ramadhani. 2014. *Politik Identitas Berbasis Agama*. Yogyakarta: APPSI UGM
- Harahap, Rizki Pristiandi. Islam Politik di Indonesia: Analisis Historis terhadap Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960). Tesis tidak diterbitkan. Jurusan Pemikiran Islam Program Studi Sosial Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan.
- Irwan, Syafitri. Islam dan Politik Identitas: Studi tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam. *Jurnal Medina-T*. Vol. 15. No. 2. Desember 2019.
- Kasdi, Abdurrahman. Genealogi dan Sejarah Perkembangan Politik Islam. *Jurnal Addin*. Vol. 9. No. 2. Agustus 2015.
- Kasdi, Abdurrahman. Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Relitas Empirik. *Jurnal Kalam: Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 9. No. 2. Desember 2015.

- Kholish, Moh. Anas dan Yulianto. Dialektika Pemikiran Islam dan Demokrasi *Manhaj Indonesia*: Sebuah Potret Historisitas, Kontinuitas dan Perubahan. *Jurnal Waskito*. Vol. 2. No. 2. 2018.
- Lestari, Yeni Sri. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Jurnal Politics and Policy*. Vol. 1. No. 1. Desember 2018.
- Lukman, Fahmy. Transformasi Politik Islam di Indonesia dalam Sistem Demokrasi. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Mahanani, Qisthi DI dkk. Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal al-Isnad*. Vol. 3. No. 1. Juni 2022.
- Maharani, Putri. Peran Identitas Agama terhadap Status Identitas Diri. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mubasirun. Persoalan Dilematis Muslim Minoritas dan Solusinya. *Jurnal Episteme*. Vol. 10. No. 1. Juni 2015.
- Putera, Rachmat Panca. Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Dari Formalistik Menuju ke Substantif. *Jurnal Ri'ayah*. Vol. 3. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Rahman, Ratnah. Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Jurnal Sosioreligius*. Vol. 1. No. 4. Juni 2019.
- Ridwan. Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan al-Banna. *Jurnal Hukum Sambudra Keadilan*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember 2017.
- Roring, Franky P. Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas dan Minoritas. *Jurnal Communitarian*. Vol. 3. No. 2. Februari 2022.
- Rozi, Syafwan. Kontruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan. *Ringkasan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati*. Vol. 39. No. 1. 2013.
- Rubaidi dan Dwi Setianingsih. Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019. *Jurnal Potret Pemikiran*. Vol. 25. No. 2. 2021.
- Rumadi. Islam dan Otoritas Keagamaan. *Jurnal Walisongo*. Vol. 20. No. 1. Mei 2012.
- Subikto, Adi Budiman dan Nur Kafid. Strategi Defensif dan Ofensif Parpol Berbasis Massa Islam dalam Mencapai *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2014. *Jurnal Shahih*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Syahdiyono, Fadli. Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mansyur Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2. Maret 2022.

Wahid. Ramli Abdul. Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia. *Jurnal Contemporary Islam and Muslim Societies*. Vol. 1. No. Juli-Desember 2017.

Wingarta, I Putu Sastra dkk. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9. No. 4.

Zaprulkhan. Dinamika Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Review Politik*. Vol. 3. No. 2. Desember 2013.

ZA, Tabrani dan Warul Walidin. Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep *Dien wa Ni'mah* dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal al-Ijtima'*. Vol. 3. No. 1 Oktober 2017.

ZA, Tabrani. Diskursus Simbiotik Agama dan Politik dalam Epistemologis Pemikiran Islam. *Jurnal al-Ijtima'*. Vol. 7. No. 1. Oktober 2021.